



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

RENCANA STRATEGIS

Bawaslu Kota Yogyakarta

2020 - 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Berkat, Karunia dan AnugerahNya lah sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 dapat tersusun. Rencana Strategis Bawaslu Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Kota Yogyakarta, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Bawaslu Kota Yogyakarta. Kami menyadari bahwa Rencana Strategis Bawaslu Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024 yang kami susun ini tidaklah sempurna, namun demikian kami mengharapkan dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan di tingkat atas dan karenanya kami mengharapkan pula saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penyusunan laporan-laporan di masa yang akan datang. Akhirnya kami sangat mengharapkan laporan ini dapat berguna dan dapat pula dijadikan sebagai bahan masukan dalam menyusun kebijakan-kebijakan penting untuk masa-masa yang akan datang.

Bawaslu Kota Yogyakarta
Ketua

Tri Agus Inharto, SH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi	3
Bab I : PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum	4
1.2 Potensi dan Permasalahan	9
Bab II : VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGIS	
2.1 Visi	19
2.2 Misi.....	19
2.3 Tujuan Strategis	20
2.4 Sasaran Strategis.....	20
Bab III : TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
3.1 Target Kinerja.....	25
Bab IV : PENUTUP	

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 Kondisi Umum

Kota Yogyakarta merupakan Ibu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 435.936 Jiwa yang berada pada ketinggian 113 Mdpl dan dilewati 3 arus sungai yang membelah Kota Yogyakarta yakni, Sungai Code, Gajah Wong dan Sungai Winanga. Salah satu indikator kepadatan penduduk dapat dilihat dari padatnya pemukiman di daerah bantaran ke 3 (tiga) tersebut.



Gambar 1.1 : Wilayah Kota Yogyakarta

Wilayah Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 45 sedangkan luas Kota Yogyakarta sebesar 32,5 KM² yang

berbatasan langsung dengan Kabupaten lainnya yakni untuk wilayah Selatan, Barat, dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul, sedangkan untuk wilayah Utara, Barat Laut, dan Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Sleman.

Wilayah Kecamatan Kota Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lainnya ada 8 Kecamatan, yakni Mergangsan, Mantrijeron, Wirobrajan, Kotagede, Umbulharjo dan Tegalrejo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul sedangkan untuk Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman antara lain Kecamatan Jetis, Tegalrejo dan Gondokusuman.

8 wilayah Kecamatan Kota Yogyakarta yang berbatasan secara langsung dengan Kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, secara tidak langsung juga turut terimbas, merasakan hinggar bingar pelaksanaan pemilihan kepala daerah, hal ini sangat dimungkinkan terjadi, mengingat batas wilayah antara Kota Yogyakarta dengan daerah Bantul dan Sleman terkadang masih dalam satu gang ataupun satu jalan kampung, bahkan di masa kampanye pemilihan kepala daerah 2020 ditemukan beberapa alat peraga kampanye Paslon Bupati dari Kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah terpasang di wilayah Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2021 Bawaslu Kota Yogyakarta belum menjadi Satuan Kerja secara mandiri dan masih menginduk kepada Bawaslu DIY.

1.1.1 Analisis Data Kepegawaian Bawaslu Kota Yogyakarta

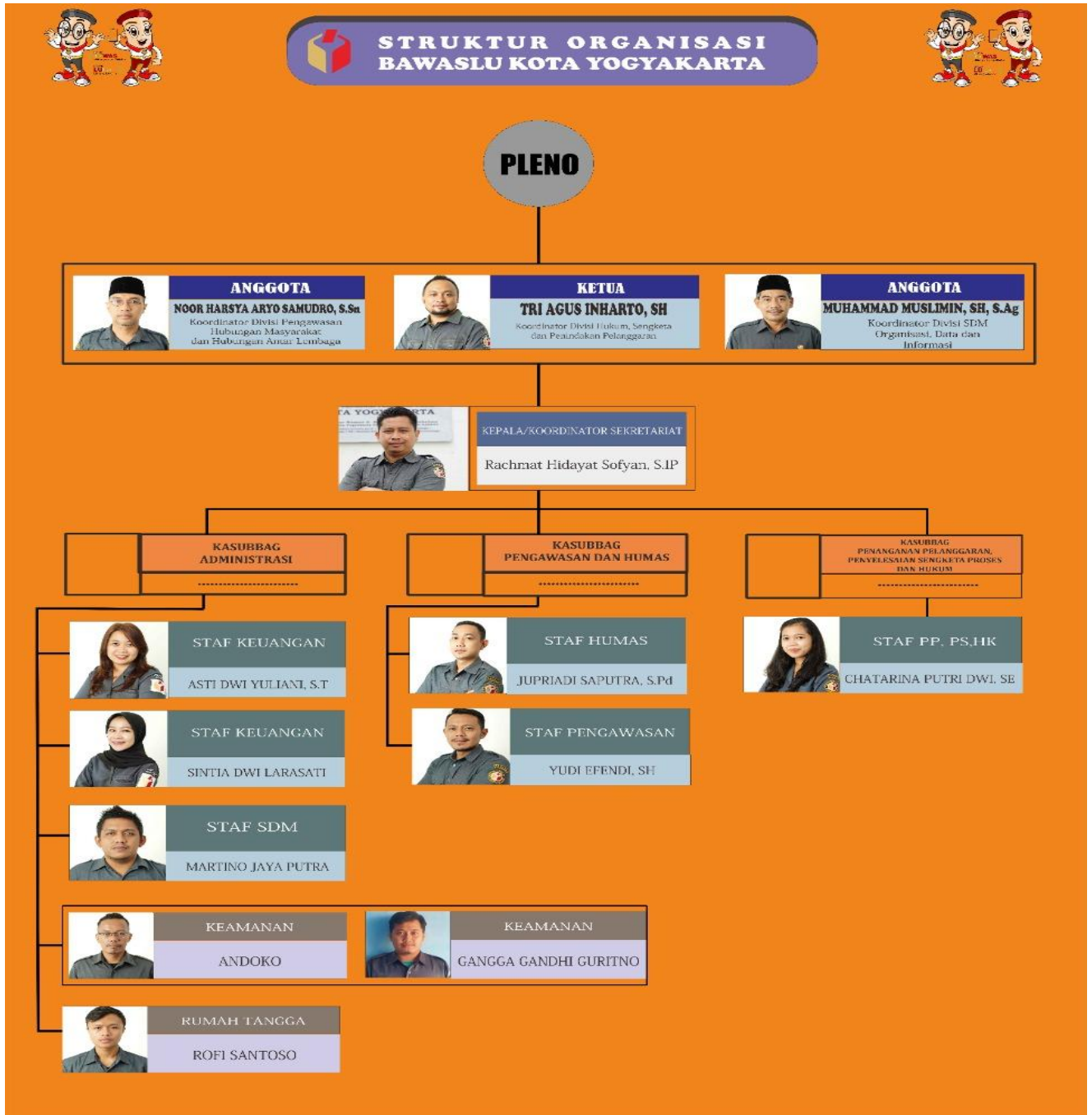
Bawaslu Kota Yogyakarta telah mengalami pengembangan organisasi berupa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Perubahan SOTK tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dimana keberadaan Pengawas Pemilu tingkat Kota yang semula bersifat adhoc, kini telah bertransformasi menjadi permanen yang kemudian diatur secara teknis melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Bawaslu Kota Yogyakarta memiliki 2 orang Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan oleh Bawaslu DIY sebagai Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pembantu Pengeluaran dengan jenjang pendidikan Strata 1 dan Diploma 3 dengan jenis kelamin 1 laki-laki dan 1 perempuan.

Bawaslu Kota Yogyakarta memiliki 9 orang Pegawai Pemerintah Non PNS dengan jenjang pendidikan 4 orang Strata 1 dan 2 orang berijazah SMA, selain dari pada itu, Bawaslu Kota Yogyakarta juga memiliki 2 orang tenaga pengaman serta 1 orang pramusaji.

Struktur organisasi Bawaslu Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019.



Gambar 1.1
 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Yogyakarta

a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta

Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta berjumlah 3 (tiga) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 2 (dua) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta dipilih secara Rapat Pleno oleh seluruh anggota Bawaslu Kota Yogyakarta dengan masa jabatan sepanjang 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengucapan sumpah/janji keanggotaan. Setiap anggota Bawaslu Kota Yogyakarta membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Kordiv yang dibawah langsung oleh para Anggota Bawaslu Kota Yogyakarta:

- 1) Kordiv. Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
- 2) Kordiv. Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga;
- 3) Kordiv. Organisasi Data dan Informasi dan SDM.

b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Kota Yogyakarta dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu DIY dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta.

Tugas dari Koordinator Sekretariat yaitu melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kota Yogyakarta serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

1.1.2 Analisis Data Sarana dan Prasarana Bawaslu Kota Yogyakarta

Bawaslu Kota Yogyakarta saat ini berkantor di Jalan Langenarjan Lor No. 6A, RT 03 RW 01 Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Tanah dan bangunan ini ditempati Bawaslu Kota Yogyakarta setelah adanya penandatanganan Perjanjian sewa rumah oleh Pemerintah Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Pemilik gedung dan bangunan.

Luas tanahnya $\pm 885\text{m}^2$, dan luas bangunan permanen seluas $\pm 350\text{m}^2$. Sesuai dengan perjanjian tersebut jangka waktu pemanfaatan tanah dan bangunan ini selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022, dan setelahnya dapat dilakukan permohonan perpanjangan perjanjian.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Bawaslu Kota Yogyakarta mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis terutama kondisi politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu Kota Yogyakarta, berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu Kota Yogyakarta

Analisis potensi permasalahan yang terjadi di Bawaslu Kota Yogyakarta didasarkan pada identifikasi dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis kedepan. Proses identifikasi dan analisis atas factor internal maupun eksternal akan dilakukan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats) dan BSC (Balanced Score Card).

SWOT BSC	STRENGTHS (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)	OPPORTUNITIES (PELUANG)	THREATS (ANCAMAN)	SOLUTION (SOLUSI)
Institusional (Kelembagaan)				Bawaslu Kota Yogyakarta belum menjadi Satuan Kerja mandiri	Menyiapkan dalam satu tahun kedepan untuk menjadi Satuan Kerja
People (SDM)	1. Kota Yogyakarta pernah menjadi Ibu Kota Negara RI pada tahun 1949, sehingga mempengaruhi masyarakat sadar peyelenggarakan demokrasi melalui lembaga perwakilan yang sudah ada sejak lama.	1. SDM internal Bawaslu Kota Yogyakarta masih terbatas, baik kuantitas dan kualitas. 2. Primordial Budaya yang dibawa oleh pendatang mempengaruhi kondusifitas wilayah. 3. Budaya feodal yang berkiblat pada Kraton mempengaruhi	1. SDM Bawaslu Kota Yogyakarta memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan Peserta Pemilu/Pemilihan.	1. Pengklaiman wilayah sebagai basis kampung peserta pemilu tertentu yang menyebabkan hilangnya kesempatan bagi peserta yang lain dalam pemasangan APK. 2. Pertikaian antar pendukung peserta Pemilu/Pemilihan	1. Pendidikan Politik pada masyarakat. 2. Peningkatan kapasitas dan penambahan SDM yang menguasai bidang tertentu.

		<p>kehidupan berdemokrasi di wilayah Kota Yogyakarta.</p> <p>4. Banyaknya pekerja dari luar wilayah Kota Yogyakarta dijadikan pemasok suara yang mudah dimobilisir untuk kepentingan pendulangan suara untuk Provinsi atau Kabupaten sekitarnya.</p> <p>5. Masa ormas dan underbow Parpol mudah dimobilisasi</p>		<p>yang masih saja terjadi pada setiap event Politik, sebagai konflik warisan.</p>	<p>3. Koordinasi dengan apartur keamanan sebagai upaya Prefentiv mengantisipasi gangguan kamtibmas.</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

		digerakkan untuk melakukan kericuhan baik di wilayah Kota Yogyakarta maupun sekitarnya.			
Financial (Anggaran)		Pemotongan dana program sebagai akibat Pandemi COVID_19, sebagai salah satu contohnya tidak adanya dana divisi Hukum.			1. Menjadi SatKer agar bisa membuat perencanaan dan mengelola anggaran secara mandiri.
Customer (Stakeholder)	Kesbangpol dan Linmas yang mendukung Bawaslu Kota Yogyakarta.	Pemerintah Kota Yogyakarta dimulai tahun 2020 tidak memberikan fasilitasi tenaga PNS yang	1. Jaringan ormas keagamaan dan kampung yang kuat dan tersebar		1. Meminta bantuan kepada Bawaslu DIY untuk menurunkan

		diperbantukan untuk Bawaslu Kota Yogyakarta serta fasilitasi yang kurang terkait kendaraan operasional.	di wilayah Kota Yogyakarta 2. Jaringan akademisi, etnis, seniman, budayawan yang ada bisa menjadi partner dalam pengawasan.		PNS ke Bawaslu Kota Yogyakarta 2. Rekrutmen tenaga kerja untuk mengisi kekosongan di Bawaslu Kota Yogyakarta
Lokality (Lokalitas)	1. Lokasi Strategis semua wilayah Kota Yogyakarta yang dapat dijangkau. 2. Sebagai Kota Pendidikan banyak berdiri Perguruan Tinggi/Universitas di wilayah Kota Yogyakarta.	1. Kepadatan penduduk berpengaruh besar pada kinerja pengawasan dan pembangunan nilai-nilai demokrasi.		1. Kemajemukan budaya, etnis yang ada di wilayah Kota Yogyakarta sehingga rawan terjadinya perbedaan penafsiran yang	1. Pendidikan politik bagi mahasiswa pendatang

	<p>3. Kota Yogyakarta sebagai miniature Indonesia hampir semua Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia memiliki asrama atau bermukim di wilayah Kota Yogyakarta.</p> <p>4. Kebudayaan menjadi roh harmonisasi kehidupan bermasyarakat yang terbukti peran dan eksistensinya Kraton Yogyakarta dan Kadipaten</p>			<p>menyebabkan konflik.</p> <p>2. Adanya kawasan-kawasan kampung yang menolak pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan alasan kondusifitas wilayah.</p>	<p>2. Koordinasi dengan pemangku wilayah dan melakukan pendidikan politik bagi Ketua Kampung</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

	Pakualaman tetap lestari.				
--	------------------------------	--	--	--	--

1.2.1 Potensi

Keberhasilan kepengawasan Pemilu dan Pemilihan akan tercapai secara maksimal apabila mendapat dukungan yang kuat baik dari stakeholder maupun masyarakat, berikut merupakan potensi daya dukung yang telah ada dalam kinerja pengawasan Bawaslu Kota Yogyakarta:

1. Terbangunnya jaringan relawan pengawasan kelompok disabilitas Kota Yogyakarta yang sepakat dengan program anti politik uang, ujaran kebencian dan hoaks Bawaslu Kota Yogyakarta.
2. Terbangunnya relawan Pemuda AMPUH (Anti Money Politik, Ujaran Kebencian dan Hoaks) yang melibatkan anak muda Kota Yogyakarta.
3. Terbangunnya relasi dan kerja sama yang baik dengan stake holder Kota Yogyakarta, seperti Bakesbangpol, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Tapem dan Dinas Perlindungan Anak.
4. Terbangunnya relasi dengan Komunitas masyarakat Tionghoa di kawasan Pecinan Kranggan.
5. Terbangunnya relasi dan kerja sama dengan Pusat Study Islam UII
6. Terbangunnya relasi dan kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta.

1.2.2 Permasalahan

Pengawasan Pemilu memiliki tantangan, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 yaitu antara lain:

1. Adanya wabah pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 menuntut tiap orang menyesuaikan diri dengan keadaan, termasuk bagi Pengawas Pemilu. Kondisi pandemi Covid-19 yang tidak melandai akan mempengaruhi proses pemutakhiran daftar pemilih yang belum komprehensif, peningkatan penyalahgunaan bantuan sosial, belum lagi verifikasi keanggotaan Parpol.

2. Potensi kekerasan antar ormas pendukung Partai Politik masih tinggi.

Sudah menjadi kebiasaan yang acap kali terulang dalam penyelenggaraan even Pemilu dan Pemilihan, bahwasanya pertikaian antar pendukung Paslon maupun Partai politik acap kali terjadi. Masa Ormas dan Parpol di wilayah Kota Yogyakarta merupakan masa yang militan yang kesatuannya terpelihara, baik dari sisi ideologis maupun ekonomi sehingga lebih mudah digerakkan. Pengalaman terjadinya

kericuhan pada masa kampanye Pemilu 2019 di berbagai wilayah DIY, lebih didominasi massa dari Kota Yogyakarta.

3. Netralitas ASN menjadi pertarungan Pemilihan Walikota

Pada pelaksanaan Pemilihan Walikota tahun 2017, Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta pernah memeriksa beberapa personel ASN yang diduga mendukung salah satu Paslon dan hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi Bawaslu Kota Yogyakarta dalam mengawasi Pilwali di 2024 mendatang.

B A B II

VISI, MISI, TUJUAN STRATEGIS, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas.

2.2 Misi

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

2.3 Tujuan

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4 Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatkan ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.4.1 Sasaran Kegiatan

2.4.1 Sasaran Kegiatan

Bawaslu Kota Yogyakarta memiliki 2 (dua) program yaitu *Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi*, dan *Program Dukungan Manajemen*. Dari kedua program tersebut kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu Kota Yogyakarta, sebagai berikut:

1. Kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, yakni:
 - a) Pelayanan Publik Lainnya
 - b) Kegiatan Pemantauan Lembaga
 - c) Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Internal
 - d) Kegiatan Layanan Umum

- e) Kegiatan Layanan Internal
- f) Kegiatan Layanan Prasarana Internal
- g) Kegiatan Layanan SDM
- h) Kegiatan Layanan Hukum
- i) Kegiatan Layanan Kehumasan dan Protokol
- j) Layanan Data dan Informasi
- k) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
- l) Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
- m) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

2. Kegiatan untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen, yakni Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.

2.4.2 Strategi

Strategi yang digunakan Bawaslu Kota Yogyakarta untuk mencapai sasaran-sasaran kegiatan di atas yaitu:

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	
Indikator Kinerja : Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota	
1.	Melakukan rapat pembinaan/penyelenggaraan pengawasan dan supervisi pengawasan Pemilu/Pemilihan
2.	Melakukan rapat koordinasi pengawasan tahapan Pemilu/Pemilihan;
3.	Supervisi dan monitoring pengawasan ke Panwaslu Kecamatan.
4.	Supervisi dan monitoring pengawasan ke Panwas Kelurahan
Indikator Kinerja : Persentase Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwas Kelurahan yang Disesuaikan dengan Regulasi	
1.	Melakukan riset dan kajian evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
2.	Melakukan rakor/bimtek/workshop penanganan temuan dan laporan pelanggaran;
3.	Melakukan rapat optimalisasi fasilitasi penanganan pelanggaran Pemilihan;

4.	Melakukan rakor/bimtek/workshop penyelesaian sengketa Pemilihan;
5.	Melakukan rakor sentra Gakkumdu;
6.	Melakukan fasilitasi penanganan pelanggaran pidana Pemilihan;
7.	Melakukan rapat advokasi pelanggaran dan pidana Pemilu/Pemilihan;
8.	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum;
9.	Melakukan rakor diseminasi peraturan perundang-undangan;
10.	Melakukan pelatihan kehumasan pengawas pemilihan;
11.	Melakukan pelatihan penyusunan JDIH pengawas Pemilu;
12.	Melakukan supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran ke Panwaslu Kecamatan;
13.	Melakukan supervisi dan monitoring penyelesaian sengketa ke Panwaslu Kecamatan;
14.	Melakukan supervisi dan monitoring penanganan pelanggaran ke Panwas Kelurahan;
15.	Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi di daerah bidang hukum

B A B III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	100%
		Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Kota Yogyakarta dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc yang disesuaikan dengan regulasi	100%
2	Meningkatnya kualitas Dukungan Manajemen, yakni Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset.		100%

a. Kerangka Pendanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membiayai perencanaan kebutuhan riil anggaran atau detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bawaslu disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan Mengacu Pada Rencana Kerja (Renja) Bawaslu.

Kerangka pendanaan untuk Renstra Bawaslu 2020-2024 disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud dari penerapan RPJM, maka penyusunan RKA Bawaslu dilakukan dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Penerapan KPJM dilakukan selama lima tahun.

Penerapan RPJM merupakan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan. Hal tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran. Tentu saja dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Kerangka pendanaan Bawaslu Kota Yogyakarta 2020-2024 dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi, serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis Bawaslu dalam bentuk pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan indikator dan target kinerja setiap tahun. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Penelaahan (review) program dan kegiatan;
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2020-2024;
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2020) bagi program dan kegiatan baru; dan
4. Menyusun prakiraan maju jangka menengah. Perhitungan prakiraan maju dilakukan untuk tahun anggaran 2021, 2022, 2023, hingga 2024 dengan menggunakan tahun dasar 2020.

Matrik kerangka pendanaan Bawaslu tahun 2020

Kode	Program / sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan / Out Put	2020
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kota Yogyakarta	
5245.002.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi Bawaslu Kota Yogyakarta <u>Indikator output</u> : - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Kota Yogyakarta	12.125.000

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN Bawaslu Kota Yogyakarta - Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan Bawaslu Kota Yogyakarta 	
5245.002.002	<p>Teknis Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Yogyakarta</p> <p><u>Indikator output :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kota Yogyakarta - Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan Bawaslu Kota Yogyakarta - Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota - Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan 	57.403.000
5245.007.002	<p>Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kota Yogyakarta</p> <p><u>Indikator output :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Bawaslu Kota Yogyakarta 	1.550.000
5245.009.002	<p>Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Kota Yogyakarta</p> <p><u>Indikator output :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi - Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik 	8.100.000
5245.951.002	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Sarana dan Prasarana Internal Bawaslu Kota Yogyakarta <p><u>Indikator output :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 	2.000.000
5245.994.002	<p>Layanan Perkantoran</p> <p><u>Indikator output :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Bawaslu Kota Yogyakarta - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 	1.093.904.000

Matrik Kerangka Pendanaan Bawaslu Kota Yogyakarta 2021 - 2024

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen Input						n+1	n+2	n+3	n+4	
Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen Input	Volume				Satuan	2021	2022	2023	2024
		2021	2022	2023	2024					
1	2	4				5	6	7	8	9
115.CQ	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU						1.353.688.000	1.421.372.400	1.563.509.640	1.719.860.604
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC						1.353.688.000	1.421.372.400	1.563.509.640	1.719.860.604
BAH	PELAYANAN PUBLIK LAINNYA						7.400.000	7.770.000	8.547.000	9.401.700
5245.BAH.002	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota									
051	Pembinaan Atau Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran									
052	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan									
BKC	Pemantauan Lembaga						96.544.000	101.371.200	111.508.320	122.659.152
5245.BKC.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota									

051	Pengawasan Pemilu Partisipatif								
052	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan								
053	Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan								
054	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota								
055	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan								
EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal					11.000.000	11.550.000	12.705.000	13.975.500
5245.EAB.002	Bawaslu Kab/Kota								
051	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran								
EAC	Layanan Umum					10.600.000	11.130.000	12.243.000	13.467.300
5245.EAC.002	Bawaslu Kab/Kota								
051	Pengelolaan BMN dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kab/Kota								
052	Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan								
EAF	Layanan SDM					10.900.000	11.445.000	12.589.500	13.848.450
5245.EAF.002	Bawaslu Kab/Kota								

051	Pembinaan SDM Pengawasan dan Kesekretariatan								
EAG	Layanan Hukum				-				
5245.EAG.002	Layanan Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota								
051	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan								
EAI	Layanan Kehumasan dan Protokol				15.350.000	16.117.500	17.729.250	19.502.175	
5245.EAI.002	Pengelolaan Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota								
051	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi								
EAJ	Layanan Data dan Informasi				15.700.000	16.485.000	18.133.500	19.946.850	
5245.EAJ.002	Pengelolaan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota								
051	Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik								
EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal				7.700.000	8.085.000	8.893.500	9.782.850	
5245.EAL.002	Bawaslu Kabupaten/Kota								
051	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program								
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal				10.900.000	11.445.000	12.589.500	13.848.450	

5245.EAN.002	Bawaslu Kabupaten/Kota								
051	Pengelolaan Administrasi Keuangan								
EAA	Layanan Perkantoran					1.167.594.000	1.225.973.700	1.348.571.070	1.483.428.177
'5245.EAA.003	Bawaslu Kabupaten/Kota								
001	Gaji dan Tunjangan								
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor								

B A B I V

PENUTUP

Secara yuridis dan fungsional, Renstra Bawaslu Kota Yogyakarta Periode 2020-2024 merupakan panduan dan arah bagi Bawaslu Kota Yogyakarta dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban secara kelembagaan Bawaslu Kota Yogyakarta ke depan. Renstra Bawaslu Kota Yogyakarta bisa menjadi bahan acuan bagi Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban masing-masing. Selain itu, melalui Renstra Bawaslu Kota Yogyakarta, seluruh struktur dan sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kota Yogyakarta, dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban secara transparan, dan akuntabel serta selalu berorientasi kepada penguatan lembaga dan peningkatan kinerja sumber daya manusia.

Pada akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra Bawaslu Kota Yogyakarta Periode 2020-2024 sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal, antara lain regulasi, pengorganisasian, sarana dan prasarana, penganggaran, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur kepemiluan dan hubungan baik dengan *stakeholder* Pemilu.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta

Tri Agus Inharto, SH